

STRATEGI PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS WIRUSAHA DESA CIPOTAKARI

¹⁾Erfina, ²⁾Monalisa Ibrahim, ³⁾Sahar, ⁴⁾Ratna Dewi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
erfina.erul85@gmail.com
monalisa2231@gmail.com
Saharkhan43111125@gamil.com
43172107.ratnadewi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan berbasis wirausaha di desa Cipotakari, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan berbasis wirausaha di desa Cipotakari. Populasi penelitian ini sebanyak 280 orang (perempuan dewasa), sedangkan sampel penelitian yaitu 72 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) observasi, (2) studi pustaka, dan (3) kuisioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan menggunakan aplikasi SPSS 2.1. Hasil penelitian Strategi Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Perempuan Berbasis Wirausaha di Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang dapat dikategorikan "kurang baik" dengan persentase 50% berdasarkan hasil rekapitulasi responden mengenai indikator strategi pemerintah. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kepemimpinan terhadap kepala desa dalam pemberdayaan perempuan dari hasil persentase memiliki pengaruh 2.3%, sedangkan faktor kekuasaan terhadap pemerintah desa Cipotakari dalam memberikan wewenang kepada perempuan untuk berwirausaha dari hasil persentase memiliki pengaruh 0%. Hal ini dapat dilihat dari uji t, dimana t hitung 0.960 lebih kecil daripada t tabel 1.997 maka H₀ diterima artinya tidak signifikan. Jadi Strategi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pemberdayaan Perempuan Berbasis Wirausaha di Desa Cipotakari.

Kata kunci : Strategi Pemerintah dan Pemberdayaan Perempuan

Abstract

The purpose of this study is to determine the government's strategy for empowering women based on entrepreneurship in Cipotakari village, to determine the factors that influence the government's strategy to empower women based on entrepreneurship in Cipotakari village. The population of this study was 280 people (adult women), while the research sample was 72 people. The data collection techniques used in this study were (1) observation, (2) literature study, and (3) questionnaire. The collected data was then analyzed using a frequency table and using the SPSS 2.1 application. The results of the research on the Government's Strategy for the Empowerment of Entrepreneur-Free Women in Cipotakari Village, Panca Rijang District, can be categorized as "not good" with a percentage of 50% based on the results of respondents' recapitulation on government strategy indicators. The factors that influence the leadership of the village head in empowering women from the percentage results have an influence of 2.3%, while the power factor on the Cipotakari village government in giving authority to women to become entrepreneurs from the percentage results has an influence of 0%. This can be seen from the t test, where t count 0.960 is smaller than t table 1.997, so H₀ is accepted meaning that it is not significant. So the Government's Strategy has no significant effect on Entrepreneurial-Based Women's Empowerment in Cipotakari Village.

Keywords: Government Strategy and Women Empowerment

A. PENDAHULUAN

Wanita saat ini memiliki berbagai macam pekerjaan, mulai dari instruktur hingga profesi. Tak bisa dipungkiri, saat ini banyak wanita yang berperan sebagai pria yang memberikan pekerjaan keluarga. Dunia kerja yang selama ini selalu dianggap memiliki tempat dengan laki-laki seiring dengan dunia publik mulai mendapatkan “penghuni” baru yang bernama perempuan yang secara konsisten diharapkan “memiliki” homegrown world, dunia “rumah” (Astuti, 2011):114). Gaji rata-rata yang dihasilkan oleh bagian atas keluarga (pasangan), mendorong para wanita untuk berperan aktif dalam membantu keuangan keluarga.

Masalah yang dihadapi (Astuti, 2011) perempuan dari kelompok berpenghasilan rendah secara khusus muncul karena mereka diidentifikasi dengan status mereka sebagai perempuan, sehingga mereka harus cukup menonjol untuk diperhatikan untuk memperluas dukungan perempuan selama pergantian peristiwa keuangan (Sajogyo, 1990):78). Proyek yang telah diselesaikan oleh otoritas publik terkait dengan bantuan pemerintah wanita. Namun, jika Anda perhatikan baik-baik, program ini tidak memiliki konsekuensi untuk wanita pada umumnya.

Metode yang mengharapkan bahwa keterbelakangan wanita hanya terletak pada wanita, oleh karena itu upaya diharapkan untuk menangani wanita. WID lebih ditujukan pada usaha-usaha terhadap pekerjaan wanita agar lebih terkoordinasi untuk dikembangkan. Proyek yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan pendekatan WID adalah program yang dapat menghasilkan bayaran untuk wanita. Dipercaya bahwa dengan memberikan sekolah ini, para wanita dapat mengatasi kapasitas intelektual, penuh perasaan, dan psikomotorik yang membantu area berguna atau publik di mata publik. Selain pelatihan, kemampuan juga diberikan, baik melalui yayasan formal maupun nonformal. Dipercaya bahwa melalui pelatihan keterampilan akan memberikan manfaat tambahan bagi wanita dalam mencari uang atau menambah gaji keluarga. Pendekatan WAD berpusat pada hubungan antara siklus wanita dan interaksi kemajuan. Dalam pendekatan WAD, orang memiliki posisi, lowongan, dan pekerjaan yang setara. Pelaksanaan pendekatan WAD dipusatkan

pada menciptakan latihan menghasilkan bayaran tanpa memperhatikan komponen waktu yang digunakan oleh ketiga wanita tersebut. Latihan berada di luar kewajiban dan kewajiban komponen homegrown. Latihan buatan sendiri berada di luar cara latihan peningkatan. Karena WAD menonjolkan hubungan antara laki-laki dan interaksi peningkatan, pelaksanaannya adalah bagian dari efisiensi perempuan baik dalam hal kondisi dan kapasitas yang menjanjikan. Isu-isu yang dipandang perempuan perlu mendapat jawaban, khususnya sebagai penguatan.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan, pemberdayaan bertujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan untuk pengentasan rakyat dari permasalahan kemiskinan. Sasaran aparat pemerintahan di segala tingkat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan yang juga diperlukan adalah rumah tangga pedesaan meliputi segala kegiatan anggotanya, sumber penghasilan dan berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan desa dengan memberikan kegiatan-kegiatan dalam kelompok seperti pembuatan keterampilan di desa. Keterampilan salah satu unsur penting dalam usaha memecahkan masalah kemiskinan di desa. Pemberian keterampilan seperti Menjahit dapat memberikan bekal wawasan yang lebih luas bagi perempuan. Keterampilan yang dimiliki perempuan dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha rumah tangga khususnya desa, untuk itu keterampilan dan peran perempuan penting dalam mengelola ekonomi keluarga dan juga dapat mengurangi angka pengangguran (Sajogyo, 1990):82).

Ada beberapa kelompok pelatihan yang terdapat di desa Cipotakari seperti Pelatihan menjahit 19 orang dengan waktu pelaksanaan 2 kali 1 pekan, pelatihan tata boga 20 orang dengan pelaksanaan 1 kali 1 pekan, dan pelatihan riasan 10 orang dengan waktu pelaksanaan 1 kali 1 pekan. Menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan di desa Cipotakari kurang efektif. Karena pelaksanaannya hanya dilakukan maksimal 2 kali dalam sepekan. Menyadari adanya berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di desa Cipotakari yaitu:

1. tingginya tingkat pengangguran bagi perempuan,
2. Kurangnya perhatian pemerintah dalam memberdayakan perempuan khususnya wirausaha,
3. Kurangnya pelatihan yang diberikan pemerintah terhadap perempuan,
4. Minimnya ruang gerak bagi perempuan dalam mengembangkan bidang wirausaha

Berdasarkan dengan hal diatas Pemerintah setempat telah mengembangkan model kewirausahaan bagi perempuan untuk dimanfaatkan dalam menunjang ekonomi keluarga, namun dalam hal tersebut belum di optimalkan, karena tersebut pemerintah kurang aktif dalam menentukan strategi dalam pengembangan wirausaha bagi perempuan.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menciptakan kemandirian bagi perempuan dengan melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut (David, 2005) ada 5 dimensi Strategi pemerintah yaitu (1) perumusan strategi, dimana pemerintah desa Cipotakari seharusnya lebih mengembangkan visi dan misi desa dan mengetahui kekuatan dan kelemahan baik peluang dan ancaman dalam internal organisasi. (2) pelaksanaan strategi, dimana pemerintah desa seharusnya menetapkan sasaran tujuan, membuat kebijakan, memotivasi masyarakat dan mengalokasikan sumber daya. (3) evaluasi strategi, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu strategi. Berdasarkan dari uraian permasalahan diatas, seiring dari teori yang di gunakan maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu Strategi Pemerintah terhadap Pemberdayaan Perempuan Berbasis Wirausaha di Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture. Indikator-indikator strategis menurut (David F. R., 2005) yaitu:

1. Perumusan strategi

Menurut (David F. , 2004) perumusan strategi meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan.

2. Pelaksanaan strategi.

Pelaksanaan strategi menurut (David F. , 2004) mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III (Budiharto, 2010) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

4. Evaluasi Strategi

Menurut (David F. , 2004) evaluasi strategi merupakan tahap akhir dari manajemen strategik, tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah, mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini.

Ripley dan Franklin dalam (Winarmo, 2005) mengenali enam atribut administrasi karena memperhatikan organisasi di AS, secara spesifik: 1) Organisasi dibuat sebagai instrumen dalam mengelola kebutuhan publik (masalah publik). 2) Organisasi adalah lembaga yang berlaku dalam pelaksanaan pengaturan umum yang mempunyai berbagai kepentingan dalam setiap ketertiban. 3) Organisasi memiliki berbagai tujuan. 4) Kapasitas organisasi berada dalam iklim yang membingungkan dan luas. 5) Organisasi memiliki dorongan daya tahan yang tinggi sehingga jarang ditemukan administrasi yang mati. 6) Administrasi jelas bukan kekuasaan yang tidak memihak dan tidak sepenuhnya mengendalikan orang-orang buangan.

Penguatan wanita adalah proses perhatian dan batas kerja untuk kerjasama yang lebih menonjol, kekuatan yang lebih besar dan pengawasan kegiatan yang

dinamis dan inovatif untuk memberikan keadilan yang lebih penting di antara wanita dan pria (Priyono, 1996).

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah yaitu:

1. Kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.
2. Kekuasaan. Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang/kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang/kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiarjo, 2002).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya berupa survey dan studi perkembangan. Adapun populasi 258 orang (perempuan dewasa) masyarakat Desa Cipotakari dan sampel 72 orang dengan menggunakan nonprobalitas sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan dengan teknik analisis data yaitu menggunakan table frekuensi dan SPSS 2.1 for windows.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dipaparkan sebelumnya untuk mengetahui Strategi Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Perempuan Berbasis Wirausaha di Desa Cipotakari, berikut ini pembahasan dari indikator penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Strategi Pemerintah

Berdasarkan hasil rekapitulasi mengenai Strategi pemerintah diperoleh persentase sebesar 50%. Termasuk dalam kriteria kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Strategi pemerintah di Desa Cipotakari termasuk kurang baik. (David F. R., 2010) mengemukakan bahwa Strategi merupakan

sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang besar.

Hasil penelitian strategi pemerintah menurut David F. R., 2005 yaitu Perumusan strategi, Pelaksanaan strategi, Disposisi, Struktur birokrasi, Evaluasi strategi. Data responden bahwa yang paling tinggi persentasenya adalah pelaksanaan strategi dengan persentase 56%. Sedangkan responden terendah adalah perumusan strategi dengan persentase 42%. Dimana masyarakat dapat berpartisipasi didalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak luar yang ingin melakukan perubahan. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil strategi pemerintah terhadap perempuan akan memberikan manfaat terkhususnya pada perempuan di bidang wirausaha.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah

Mengingat konsekuensi dari pengulangan, tingkat 16,8% tidak memiliki dampak, menurut Weelan dan Appetite, sistem dicirikan sebagai strategi akhir yang menjangkau jauh yang menyatakan bagaimana organisasi mencapai tujuan dan sasaran utamanya dengan memperkuat keunggulan. dan membatasi kerugian dengan membatasi kemalangan. Paksaan adalah jabatan yang dapat diperoleh seseorang/kumpulan untuk melatih ahli sesuai jabatan yang diberikan, wewenang tidak dapat dilakukan melewati kekuasaan yang didapat atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku individu/kelompok sesuai keinginan pelakunya (Miriam Budiarjo, 2002) atau Force adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok yang berbeda untuk berpikir dan bertindak sesuai keinginan pihak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti, 1992).

Perempuan didesa Cipotakari dalam melibatkan diri untuk berwirausaha 9%, Perempuan di Desa Cipotakari dalam melibatkan diri untuk merencanakan program wirausaha 0%, Kemampuan perempuan di Desa Cipotakari dalam mengelola wirausaha 0.9%, Kemampuan perempuan dalam pemberdayaan organisasi desa 4.6 %,

Kepala desa dalam pemberdayaan perempuan untuk berwirausaha di Desa Cipotakati 2.3%, Pemerintah Desa Cipotakari dalam memberikan wewenang kepada perempuan untuk berwirausaha 0%.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis merumuskan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut :

1. Strategi pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan berbasis wirausaha di desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk dalam kategori kurang baik yaitu 50%. Berdasarkan pendapat teori David F. R., 2005, dengan rekapitulasi kuisioner indikator Strategi Pemerintah di peroleh 50%, dengan kategori Kurang baik. Hal ini berarti indikator dari Strategi pemerintah yang seharusnya mencapai 100% namun terdapat 50% persentase yang tidak tercapai kategori baik. Indikator paling tinggi yaitu pelaksanaan strategi dengan persentase 56%, sedangkan persentase yang paling rendah yaitu perumusan strategi dengan persentase 42%. Oleh karena itu masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi kedepannya.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa di dapatkan oleh seseorang / kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang/kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiarmo, 2002). Faktor pelibatan diri dalam Strategi pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan yaitu 9%, faktor kepemimpinan dalam pemberdayaan perempuan di Desa Cipotakari yaitu 0%, faktor pengelolaan dalam pemberdayaan perempuan di desa Cipotakari yaitu 0.9%, faktor fungsi organisasi dalam pemberdayaan perempuan di desa Cipotakari yaitu 4.6%, faktor kepemimpinan dalam Strategi pemerintah yaitu 2.3%, dan faktor kekuasaan dalam strategi pemerintah yaitu 0%. Strategi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan perempuan berbasis

wirausaha. Hal ini dapat dilihat dari uji t, dimana t hitung 0.960 lebih kecil daripada t tabel. Namun pengaruhnya hanya 13% seperti yang ditunjukkan oleh tabel model Summary dimana nilai S quare 0.013%. sedangkan sisanya di dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dengan persentase 87%.

E. REFERENSI

Buku

- David, F. (2004). *Manajemen Strategis*. Jakarta: PT. Prenhallindo. (2010). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat. (2005). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- F, J. L. (1989). *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Setiyadi, A. B. (2006). *Metode penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Astuti. (2011). *analisis keuntungan sistem pertanian terpadu berbasis hortikultura pada kelompok tani bumi harapan di negeri koto tinggi kecamatan baso kabupaten agam [skripsi]*. Padang: Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Budiharto, W. (2010). *Robotika-Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- David, F. (2004). *Manajemen Strategis*. Jakarta: PT. Prenhallindo. (2010). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat. (2005). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- F, J. L. (1989). *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Juliantara, D. (2002). *Pembaruan Desa: Bertumpu Pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Nugroho, R. (2008). *Public Polic*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Prijono, O. P. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Sajogyo, S. D. (1990). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Setiyadi, A. B. (2006). *Metode penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, E. (2010). *Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh, A. (2004). *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gala Media.
- Winarmo, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.